KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

A.1 NPWP : 6 8 8 0 7 5 7 3 8 7 2 2 0 0 0 0 A.2 NIK :											
A.3 Nama : AGUS SUTRASNO B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (MDE OBJEK PAJAK ORD) B. 1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 4 21-402-01 2.500.000 2.500.000 0 5 125.00 Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen O4392/LS-THR/RSJD.AHM/2022 Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (OTP) berdasarkan : Tanggal dd mm mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (OTP) berdasarkan : C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.3 ID Subunit Organisasi : RIANDY C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.											
A.3 Nama : AGUS SUTRASNO B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (MDE OBJEK PAJAK ORD) B. 1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 4 21-402-01 2.500.000 2.500.000 0 5 125.00 Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen O4392/LS-THR/RSJD.AHM/2022 Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (OTP) berdasarkan : Tanggal dd mm mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (OTP) berdasarkan : C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.3 ID Subunit Organisasi : RIANDY C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.	A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG										
A.3 Nama : AGUS SUTRASNO B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (mm-yyyy)	A.1 NPWP : 68 807 573 8 722 000										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (mm-yyyy)	A.2 NIK :										
MASA PAJAK (MDE OBJEK PAJAK JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF LEBIH TINGGI 20% (Rp) PPh DIPOTONG/DTP (Rp) B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 4 21-402-01 2.500.000 2.500.000 0 5 125.00 Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen D4392/LS-THR/RSJD.AHM/2022 D6 dd	A.3 Nama : AGUS SUTRASNO										
MASA PAJAK (mm-yyyy) B.1 B.2 B.3 B.4 21-402-01 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.5 125.00 Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah : Q 5 3 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.3 ID Subunit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.5 Nama Penandatangan : RIANDY Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara	B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen			KODE OBJEK PAJAK	BRUTO			TINGGI 20% (TIDAK BER-				
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen	B.′	1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.3 ID Subunit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.4 Tanggal : 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy C.5 Nama Penandatangan : RIANDY C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.	4 21-402-01			2.500.000	2.500.000	0	5	125.000			
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.3 ID Subunit Organisasi :	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan: B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:										
	C.2 Nan C.3 ID S C.4 Tan C.5 Nan	na Instans Subunit O Iggal na Penanc	si Pemerintah : rganisasi : : datangan :	RUMA 2 6 RIAND Dengar tandata	dd 0 4 mm In ini saya menyatakan bangani secara elektronik.	RAH ATMA HUSADA MAHAK 2 0 2 2 yyyy ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	AM PROVINSI k	saya isi dengan	benar dan telah saya		

WUGLDCCJ